



Partisipasi Politik Generasi Muda dalam Demokrasi Modern: Menggali Dinamika dan Aspirasi Politik Generasi Muda dalam Merespons Demokrasi yang Terus Berubah

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Aminuddin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara aminuddin@uinsu.ac.id Desy Wulandari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara desiwulandariazza1122@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Aminuddin, & Wulandari, D. (2025). Partisipasi Politik Generasi Muda dalam Demokrasi Modern: Menggali Dinamika dan Aspirasi Politik Generasi Muda dalam Merespons Demokrasi yang Terus Berubah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5918-5927.

Abstrak

Struktur politik mencakup berbagai komponen, seperti pemerintahan, kekuasaan, institusi politik, serta peraturan dan kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat. Komponen tersebut dikerucutkan menjadi *trias politica*: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, struktur inilah yang paling tepat menjadi pondasi dan/atau pilar pelaksanaan ketatanegaraan, yang membangun atau mendorong sikap partisipatif masyarakat sipil, ketika posisi tersebut diperebutkan di kalangan masyarakat elite terutama pemilihan eksekutif dan legislatif. Sehingga dari struktur ini menciptakan sistem politik dalam pencapaian kekuasaan yang dimaksud. Melalui perilaku partisipatif tersebut membawa keterlibatan individu dalam kegiatan politik yang berakar pada sosial ataupun budaya dalam suatu negara tertentu, bahkan dapat mempengaruhi kebijakan publik. Kerangka partisipasi masyarakat ini dalam kegiatan politik terbuka (demokrasi) sangat bergantung pada mobilisasi, jejaring dan rasisme. Nah, lebih lanjut bagaimana eksistensi generasi muda mempengaruhi gejala dinamika dalam merespons demokrasi yang terus berubah. Dampak tersebut sehingga menarik perhatian penulis untuk menganalisis perilaku partisipatif generasi muda dalam negara demokratis. Adapun metodologi analisis dalam tulisan ini menggunakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber literasi buku yang bertema tentang perilaku politik masyarakat dan dampak yang ditimbulkan.

Kata Kunci: mobilisasi, jejaring dan rasisme

Abstract

The political structure encompasses various components, such as government, power, political institutions, and regulations and policies that govern people's lives. These components are narrowed down to the trias politica: Executive, Legislative, and Judicial. This structure is the most appropriate foundation and/or pillar of state administration, which builds or encourages a participatory attitude of civil society, when these positions are contested among elites, especially in executive and legislative elections. Thus, this structure creates a political system for achieving the intended power. Through this participatory behavior, individuals are involved in political activities rooted in the social or cultural context of a particular country, and can even influence public policy. This framework for public participation in open political activities (democracy) relies heavily on mobilization, networking, and racism. Furthermore, how the existence of the younger generation influences the dynamic fluctuations in responding to the ever-changing democracy. This impact has drawn the author's attention to analyze the participatory behavior of the younger generation in a democratic country. The analytical methodology in this paper uses data collection methods from various literary sources on the theme of public political behavior and its resulting impacts.

Keywords: mobilization, networking and racism

A. Pendahuluan

Pembentukan dinamika aspirasi politik di kalangan generasi muda sebenarnya dipengaruhi oleh elemen-elemen dalam sistem politik. Melalui sistem politik yang ada, generasi dipengaruhi dalam cara mereka berpikir, berperilaku dan berpartisipasi dalam proses-proses aspirasi politik terhadap kebijakan politik. Sistem politik dimaksud juga sebagai struktur politik, yaitu mencakup berbagai komponen, seperti sistem pemerintahan, kekuasaan, institusi politik, serta peraturan dan kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi generasi muda dalam proses politik menjadi kunci penting dalam menentukan arah perubahan kebijakan publik, karena generasi muda sering disebut sebagai *agent of change*. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana eksistensi generasi muda mempengaruhi gejolak dinamika dalam merespons demokrasi yang terus berubah?

Aspirasi politik kerap kali merujuk kepada berbagai komponen atau komposisi pada sistem institusi, dimana sistem institusi politik ini akan mengatur pembagian kekuasaan. Seperti: Eksekutif (pemerintah), Legislatif (perwakilan) dan Yudikatif (peradilan), inilah yang membangun atau mendorong sikap partisipatif dalam generasi muda, ketika posisi tersebut diperebutkan di kalangan masyarakat elite terutama eksekutif dan legislatif. Sehingga dari rotasi ini menciptakan sistem politik dalam terjadinya dinamika politik hingga timbulnya aspirasi politik yang dimaksud diatas. Perilaku partisipatif mengacu pada keterlibatan individu dalam kegiatan politik yang berakar pada dinamika ataupun aspirasi politik, seperti melalui konsensus pemimpin/perwakilan, demonstrasi, kegiatan politik lainnya atau bahkan dalam aktivitas sosial yang berpengaruh pada kebijakan publik.

Dan hal ini biasa terjadi di negara-negara demokrasi, yang lebih stabil atau kurang stabil, efektif atau kurang efektif, bahkan sekalipun kurang partisipatif. Dapat diuji dengan menghubungkan antara seperangkat pola sikap dengan karakteristik sistem politik yang dianut di suatu negara, maka dapat mendukung hipotesa ini bahwa sikap tertentu tersebut berkaitan dengan jenis sistem partisipatif tertentu, dengan pola karakteristik sistem politik ke frekuensi sikap tertentu dalam sistem partisipasi (Gabriel A. 1989). Sedangkan bentuk sistem politiknya dalam mencapai kekuasaan dalam bentuk kenegaraan, indentik dengan polarisasi ideologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Alan Dahl (1915-2014), ilmuwan politik Amerika, dalam bukunya yang terkemuka "*Polyarchy: Participation and Opposition*", hingga ia menyebut Does Polyarchy Matter?.

Sebut saja seperti bentuk demokrasi atau otoriter (penulis ambill contoh dua saja, walaupun banyak di kalangan ilmuwan politik menyebut bentuk-bentuk sistem politik) untuk mempermudah kita menganalisis perilaku partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Partisipasi yang dimaksud adalah seperti yang bersifat bisa langsung (konsensus atau referendum) atau tidak langsung (mendukung kelompok politik atau organisasi masyarakat).

Dalam wacana partisipasi generasi muda dalam kegiatan politik terbuka (demokrasi) sangat bergantung pada mobilisasi dan jejaring. Partisipasi generasi muda dalam kegiatan politik sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia, seperti pendidikan, kekayaan, waktu luang dan akses terhadap informasi. Terkadang masyarakat dengan akses lebih besar terhadap sumber daya cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Aliansi dan pertukaran sumber daya menjadi kekuatan politik. Kekuatan sumber daya menjadi pondasi dominan untuk mengambil kekuasaan. Gerakan perilaku ini dipopulerkan oleh Karl Marx (1818-1883), buku berjudul *"The Communist Manifesto, 1848"*, penekanan kelas pekerja (*proletariay*) dapat memobilisasi umtuk melakukan revolusi melawan kapitalisme. Charles Tilly (1929-2008), berjudul *"From Mobilization to Revolution, 1978"* mengembangkan teori mobilisasi sumber daya, yang menjelaskan bahwa keberhasilan mobilisasi politik tergantung pada akses terhadap sumber daya, organisasi dan kepemimpinan. Sidney Tarrow (1938) dalam bukunya *"Power in Movement, 1994"* Tarrow membahas bagaimana gerakan sosial menggunakan mobilisasi politik untuk menekan pemerintahan dan mengubah kebijakan. Samuel P. Huntington (1927-2008) dalam *"Political Order in Changing Societies, 1968"*, Huntington menjelaskan bahwa mobilisasi massa sering terjadi di negara berkembang sebagai reaksi terhadap perubahan sosial yang cepat.

Selain itu, ada juga teori yang menggemukan bahwa jaringan sosial mampu mendorong partisipasi politik. Teori ini ada benarnya, karena ternyata secara nyata dapat kita analisis di medan perpolitikan (katakanlah ketika masa kampanye politik), bahwa seseorang individu yang terhubung dalam jaringan sosial yang lebih luas cenderung lebih dekat keterlibatannya dalam kegiatan politik karena adanya interaksi dan saling mempengaruhi dalam kelompok mereka. Tokoh utama dalam teori ini Mark Granovetter (1943), *"Getting a Job, 1974"*, mengembangkan konsep *Strength of Weak Ties*, yang menunjukkan bahwa hubungan sosial lemah lebih efektif dalam menyebarkan informasi politik dibandingkan hubungan erat seperti keluarga. Robert D. Putnam (1941), dalam bukunya *"Bowling Alone, 2000"*, Putnam membahas bagaimana berkurangnya keterlibatan sosial dalam komunitas mengurangi partisipasi politik. Manuel Castells (1942), buku berjudul *"The Rise of the Network Society, 1996"* meneliti bagaimana internet dan media sosial membentuk jaringan politik global, terutama dalam gerakan sosial modern seperti Arab Spring. James S. Coleman (1926- 1995), berjudul *"Foundations of Social Theory, 1990"* mengembangkan teori modal sosial yang menjelaskan bahwa jaringan sosial dapat meningkatkan keterlibatan politik dan demokrasi.

Dan ada juga teori yang menjelaskan bahwa ada generasi cenderung ikut-ikutan karena memiliki kesamaan latar belakang, contohnya seperti kesamaan suku, budaya, almamater ataupun visi. Sehingga memicu rasa kedekatan emosional, menyentuh perasaan dan menaruh harapan, efek ini menjadi sarana mendorong yang efektif dalam partisipasi politik (*bandwagon effect*). Harold Hotelling (1895-1973), dalam buku *"Stability in Competition, 1929"*, ia menjelaskan bagaimana pilihan individu dalam ekonomi dan politik sering kali menyesuaikan diri dengan tren mayoritas. Paul F. Lazarsfeld (1901- 1976), berjudul *"The People's Choice, 1944"*, ia menemukan bahwa pemilih sering kali dipengaruhi oleh opini mayoritas yang ditampilkan dalam media. Albert Mehrabian (1939), *"Silent Messages, 1971"*, meneliti dampak psikologis dari efek bandwagon dan bagaimana opini mayoritas dalam survei politik dapat memengaruhi perilaku pemilih. Solomon Asch (1907-1996), *"Studies of Indenpendence and Conformity, 1956"*, dalam eksperimen psikologi sosialnya, Asch menunjukkan individu cenderung mengikuti opini mayoritas meskipun itu bertentangan dengan pemikiran pribadi mereka.

Nah, struktur politik yang menggunakan sistem politik terbuka (inklusif) dan demokrasi sering kali mendorong partisipasi yang lebih tinggi. Sementara sistem yang lebih tertutup (eksklusif) atau otoriter cenderung membatasi ruang untuk berpartisipasi. Dalam hal sistem politik inklusif ini, cenderung memiliki dorongan kebutuhan lebih tinggi dalam hal partisipasi sehingga menarik perhatian penulis untuk menganalisis perilaku partisipatif masyarakat dalam negara demokratis. Adapun metodologi analisis dalam tulisan ini menggunakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber literasi buku (*library research*) bertema tentang perilaku politik masyarakat dan dampak yang ditimbulkan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis partisipasi politik generasi muda dalam demokrasi modern. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk menggali secara mendalam fenomena sosial yang terjadi,

khususnya terkait dengan mobilisasi massa, jaringan sosial, dan efek bandwagon yang memengaruhi perilaku politik generasi muda. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik *library research* atau penelitian pustaka, yang mengacu pada pengumpulan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik studi. Sumber data utama meliputi buku, artikel ilmiah, serta laporan penelitian yang membahas tentang perilaku politik masyarakat dan dinamika demokrasi, dengan fokus utama pada peran generasi muda sebagai aktor dalam proses politik demokratis.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji literatur yang mengulas teori-teori dasar terkait partisipasi politik, seperti teori mobilisasi sumber daya, teori jaringan sosial, dan efek bandwagon. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan teknologi berperan dalam membentuk pola partisipasi politik generasi muda dalam demokrasi modern. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi, di mana penulis mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan konsep-konsep yang muncul dalam literatur yang ada. Hal ini memungkinkan penulis untuk mengelompokkan informasi berdasarkan relevansinya dengan topik yang diteliti, dan menganalisis bagaimana perubahan sosial dan digital memengaruhi pola partisipasi politik generasi muda.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan teoritis yang mendasari analisis, di antaranya adalah teori mobilisasi sumber daya yang dikemukakan oleh Tilly (1978), teori jaringan sosial dari Granovetter (1974), dan konsep efek bandwagon yang diperkenalkan oleh Hotelling (1929). Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mobilisasi politik, jaringan sosial, dan pengaruh mayoritas membentuk perilaku politik generasi muda dalam konteks demokrasi modern. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, penulis menggunakan sumber-sumber yang sah dan terpercaya serta mengkaji beragam perspektif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik mengenai fenomena yang sedang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Dalam Demokrasi Modern

Dalam tatanan sistem politik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah yang berfungsi untuk memenangkan konsensus, mendapatkan legilasi, terlibat diskursus untuk mempengaruhi kebijakan publik. Adapun semangat pesta demokrasi yang utuh, dapat kita saksikan ketika terjadi proses konsensus atau referendum bahkan kampanye. Namun selama dalam proses komponen-komponen demokrasi tersebut, terjadi bentuk-bentuk partisipatif yang dimaksud diantaranya:

1. Mobilisasi massa, keikutsertaan rakyat dalam proses politik tidaklah hanya bersifat individual atau spontan tapi bisa terjadi secara terorganisir atau kolektif. Berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti pengaruh elit/partai politik atau lembaga/organisasi masyarakat. Dimana individu atau kelompok diaktifkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Mobilisasi yang bersifat Top Down, ketika elit politik mengerakkan massa untuk mencapai tujuan politik tertentu. Sedangkan mobilisasi yang bersifat Botton Up, ketika inisiatif yang berasal dari masyarakat itu sendiri untuk melakukan demonstrasi sebagai gerakan sosial (La Ode Muhammad Elwan 2019). Teori mobilisasi politik menyoroti individu dan kelompok digerakkan untuk berpartisipasi dalam politik melalui berbagai metode dan faktor yang mempengaruhinya. Mobilisasi ini dapat memperkuat demokrasi jika dilakukan secara sehat, tetapi juga dapat menimbulkan polarisasi jika digunakan secara manipulatif.
2. Jaringan Sosial, aktor-aktor politik saling berinteraksi dan membentuk hubungan dalam suatu sistem politik. Jaringan ini terdiri dari berbagai entitas, yang terhubung melalui komunikasi digital, baik secara bekerjasama atau bersaing dalam arena politik. Jaringan sosial lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Aktor dalam jaringan sosial saling bergantung untuk mencapai tujuan politik mereka. Koneksi antaraktor menjadi modal utama dalam melakukan kegiatan politik (Sansan Hasanudin 2017). Terbentuknya jaringan sosial karena adanya kepentingan dalam sistem politik, yang saling terhubung melalui interaksi sosial, pertukaran informasi dan hubungan timbal balik. Dalam era- digital, peran jaringan sosial semakin kuat mendorong partisipasi publik, baik dalam konteks demokrasi maupun gerakan sosial global.
3. Bandwagon effect, adalah kecenderungan individu untuk mengikuti pilihan politik yang tampaknya populer atau dominan di masyarakat. Kecenderungan ini bisa berasal dari kesamaan latar belakang, budaya, suku atau visi dengan mereka. Fenomena ini sering terjadi dalam konsensus legislasi ataupun eksekutif dan kampanye politik ketika individu

mendukung kandidat atau partai yang terlihat memiliki dukungan luas. Misalnya, calon yang berasal daerah yang sama atau memiliki latar belakang yang sama dapat memicu rasa kedekatan emosional. Dalam banyak kasus, jika suatu kelompok sudah mengidentifikasi diri dengan calon tertentu/kandidat, ada kecenderungan untuk ikut serta dalam kelompok tersebut, mengikuti arus dan menghindari konflik sosial (Sugeng Winarno 2023).

Demokrasi modern menekankan keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik. Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik mencakup aktivitas sukarela seseorang dalam memengaruhi pembuatan keputusan publik. Generasi muda, dengan karakteristik keterbukaan, kreativitas, dan kemampuan adaptasi tinggi terhadap teknologi, memiliki potensi besar untuk memperluas partisipasi politik ke bentuk-bentuk baru di luar mekanisme tradisional seperti pemilihan umum atau kegiatan partai politik (Miriam Budiardjo 2008)

Secara historis, partisipasi politik generasi muda sering dipahami dalam kerangka tradisional seperti pemilu dan keanggotaan organisasi politik. Namun, dalam demokrasi modern, bentuk partisipasi tersebut mengalami pergeseran. Dalam era-demokrasi modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi, keterbukaan informasi, serta perubahan sosial yang cepat, generasi muda menjadi salah satu aktor politik yang paling menentukan arah masa depan suatu bangsa. Mereka tidak hanya menjadi penerus kepemimpinan politik, tetapi sekaligus menjadi kelompok yang membawa warna baru dalam proses demokratisasi.

Partisipasi politik generasi muda mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, mulai dari perkembangan teknologi digital hingga pergeseran nilai, menggali pemahaman mengenai bagaimana generasi muda merespons demokrasi yang terus berubah menjadi sebuah urgensi untuk memperkuat kualitas demokrasi itu sendiri. Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa partisipasi politik dalam demokrasi tidak hanya bersifat elektoral, tetapi mencakup aktivitas seperti penyampaian aspirasi, advokasi kebijakan, protes sosial, dan penggunaan media. Hal ini menunjukkan bahwa politik modern semakin menekankan pluralitas bentuk keterlibatan warga negara (Ramlan Surbakti 2010)

Dinamika Perubahan Dalam Partisipasi Politik Generasi Muda

Suatu negara, terutama yang menganut demokrasi, struktur politik-nya dapat didefinisikan sebagai kerangka institusional yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga politik, partai politik dan warga negara. Dimana pemerintahan yang menekankan pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Ketika penentuan sistem politik telah ditentukan akan terbangun struktur politik untuk melengkapi administrasi ketatanegaraan. Struktur politik membentuk dasar bagi dinamika politik dalam suatu negara, memengaruhi seberapa terbuka dan tertutupnya sistem politik terhadap partisipasi publik, serta bagaimana keputusan penting diambil dan diterapkan.

Menjadi salah satu elemen yang fundamnetal dalam demokrasi, yaitu partisipasi politik, yang mencakup segala bentuk keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik terutama dari kalangan generasi muda. Contohnya saja seperti: konsensus pemilihan kepala pemerintahan baik sentralisasi maupun desentralisasi, konsensus perwakilan rakyat. Bahkan ditandai dengan adanya aksi proses (demonstrasi), seperti terjadi partisipasi organisasi politik dalam memposisikan oposisi maupun koalisi.

Ungkapan Sidney Verba, dan diyakini oleh para akademisi lainnya tentang partisipasi politik, adalah bahwa "partisipasi warga negara adalah jantungnya demokrasi". Para akademisi percaya bahwa partisipasi politik adalah inti demokrasi. Karena dapat dikatakan bahwa demokrasi tidak akan terjadi tanpa kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses bernegara (Saiful Mujani 2007). Sehingga memungkinkan sangat beragam terbentuk aktivitas politik didalamnya karena keterlibatan partisipasi politik terutama adanya peranan generasi muda, dan ini menjadi akar budaya politik dalam masyarakat demokrasi. Masyarakat sipil yang berperan dalam proses pembuatan keputusan, yang disebut kedaulatan rakyat merupakan salah satu komponen struktur politik selain lembaga negara yang telah penulis tuliskan dalam pendahuluan.

Hal tersebut, membentuk budaya politik dalam tatanan demokrasi, yang berakar dari aktivitas politik terutama generasi muda, yang kemudian berwujud menjadi partisipatif dalam proses politik, seperti konsensus, legilasi, bahkan diskursus publik yang memungkinkan kebijakan dan keputusan politik dibuat. Budaya ini menggambarkan hubungan antar kekuasaan dan generasi muda. Bisa saja kemudian terbentuk kelompok generasi muda yang terorganisir dalam kelembagaan yang nantinya disebut partai politik atau lembaga aspirasi (LSM/NGO). Yang berfungsi untuk memenangkan konsensus, mendapatkan legilasi, terlibat diskursus untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Oleh karena itu, fenomena yang terjadi dengan demokrasi modern menghadirkan ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk mengekspresikan aspirasi politik. Platform digital seperti media sosial, forum online, hingga petisi digital memungkinkan mereka menyampaikan opini secara cepat, bebas dan masif. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang sangat tergantung pada mekanisme politik formal, generasi muda kini dapat mempengaruhi kebijakan publik melalui gerakan digital yang fleksibel dan partisipatif. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran bentuk partisipasi politik dari yang bersifat konvensional, seperti pemilihan umum atau organisasi formal, menuju bentuk- bentuk baru yang lebih spontan, kreatif dan mudah diakses.

Generasi muda cenderung lebih aktif di ruang digital dibandingkan ruang formal politik. Media sosial menjadi wadah baru untuk menyampaikan opini, kampanye isu, dan membangun gerakan sosial. Fenomena ini menjelaskan bahwa demokrasi digital telah menggeser fokus partisipasi dari ruang fisik ke ruang maya, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi kaum muda. Partisipasi politik generasi muda kerap dipengaruhi oleh kesadaran kritis terhadap isu-isu keadilan sosial, lingkungan, ekonomi, serta hak asasi manusia. Generasi muda pada umumnya memiliki tingkat literasi digital yang tinggi, sehingga mereka dapat mengakses, mengevaluasi, dan mengkritisi berbagai kebijakan atau fenomena politik dengan lebih cepat (Wijayanto 2014).

Sensitivitas terhadap isu-isu ini mendorong mereka terlibat dalam berbagai gerakan sosial, baik lokal maupun global. Gerakan lingkungan, anti- korupsi, keterbukaan informasi, hingga hak-hak marginal menjadi contoh bagaimana aspirasi politik generasi muda sering muncul dari keresahan terhadap ketidakadilan yang mereka amati di dunia nyata maupun ruang digital. Meskipun memiliki potensi besar, partisipasi politik generasi muda juga menghadapi berbagai tantangan struktural maupun psikologis.

Minimnya pendidikan politik formal, rendahnya kepercayaan terhadap institusi politik, serta maraknya disinformasi menjadi faktor yang dapat melemahkan keterlibatan mereka. Banyak generasi muda yang merasa bahwa politik identik dengan praktik koruptif dan jauh dari kepentingan rakyat. Akibatnya, sebagian dari mereka memilih bersikap apatis atau hanya berpartisipasi dalam isu-isu tertentu tanpa terlibat secara berkelanjutan dalam sistem politik. Tantangan ini menunjukkan pentingnya revitalisasi pendidikan politik dan penguatan institusi demokrasi agar mampu menarik minat dan kepercayaan generasi baru.

Generasi muda dikenal memiliki kecenderungan independen dalam melihat isu politik. Bahwa modernisasi politik memunculkan warga negara yang lebih rasional dan kritis terhadap elite politik. Hal ini terlihat dalam sikap generasi muda yang sering memosisikan diri sebagai pengawas kekuasaan, bukan sekadar pendukung partai politik. Selain itu, demokrasi modern menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi. Perubahan teknologi informasi yang begitu cepat membuat pola komunikasi politik terus bergeser (Affan Gaffar 2009).

Generasi muda cenderung menginginkan proses politik yang lebih transparan, inklusif, dan responsif. Mereka menolak proses birokratis yang lambat dan cenderung mengabaikan suara publik. Oleh karena itu, partai politik dan institusi negara perlu membangun mekanisme yang lebih terbuka untuk mengakomodasi dorongan perubahan dari generasi muda. Ketidakmampuan untuk merespons aspirasi ini dapat menimbulkan jurang antara generasi muda dan institusi politik tradisional. Di sisi lain, munculnya pemimpin-pemimpin muda di berbagai negara membuktikan bahwa generasi muda bukan hanya objek politik, tetapi juga subjek yang mampu mengarahkan perubahan.

Kekecewaan terhadap praktik politik yang dianggap elitis dan koruptif mendorong generasi muda menuntut tata kelola yang lebih transparan. Aspirasi ini mencerminkan perkembangan “nilai-nilai demokrasi baru” yang menekankan integritas politik. Keterlibatan mereka dalam ruang politik formal—seperti menjadi anggota dewan, aktivis sosial, atau penggerak komunitas—membuktikan bahwa mereka memiliki kompetensi, jaringan, serta visi yang relevan dengan tantangan zaman. Partisipasi politik generasi muda tidak hanya memperkuat legitimasi demokrasi, tetapi juga membawa inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik (Ramlan Surbakti 2010).

Secara keseluruhan, dinamika partisipasi politik generasi muda dalam demokrasi modern menunjukkan bahwa mereka merupakan kekuatan penting yang dapat mempercepat transformasi sosial-politik. Gerakan seperti demonstrasi, tuntutan isu lingkungan, dan penegakan hak asasi manusia menunjukkan peran generasi muda sebagai motor perubahan. Kehadiran mereka tidak selalu melalui struktur politik formal, tetapi melalui aksi kolektif yang lebih cair dan horizontal. Bahwa politik generasi muda kini tidak selalu terkait lembaga, melainkan praktik budaya yang berakar dari identitas dan ekspresi (Ariel Heryanto, 2010)

Aspirasi mereka terhadap transparansi, keadilan, dan partisipasi publik menjadi dorongan bagi demokrasi untuk terus berkembang. Namun, agar potensi ini dapat dimaksimalkan, diperlukan sinergi antara generasi muda, institusi politik, dan masyarakat luas untuk menciptakan ruang demokrasi yang lebih sehat, inklusif, dan berorientasi masa depan. Demokrasi bukanlah sistem yang statis; ia berkembang seiring perubahan zaman—dan generasi muda adalah motor penggerak terpenting dalam perubahan tersebut. Perkembangan demokrasi modern tidak dapat dilepaskan dari peran generasi muda sebagai salah satu aktor politik yang paling dinamis.

Dalam konteks Indonesia, generasi muda sejak awal sejarah politik nasional telah menempati posisi penting dalam perubahan sosial—mulai dari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, hingga Reformasi 1998. Dalam era demokrasi kontemporer, partisipasi politik generasi muda menghadapi tantangan baru sekaligus peluang baru yang dipengaruhi oleh digitalisasi, perubahan nilai sosial, dan dinamika politik elektoral.

Aspirasi Politik Generasi Muda Dalam Demokrasi Kontemporer

Almound dan Verba, menyatakan bahwa: “Kepercayaan pada institusi politik adalah sesuatu yang krusial untuk menstabilisasikan demokrasi. Adalah bahwa kepercayaan pada institusi politik memungkinkan pemerintah untuk berkerja secara efektif tanpa interupsi dan gangguan yang tidak perlu. Kenyataannya, sekalipun tingkat kepercayaan pada institusi politik di negara demokrasi modern manapun rendah, tidak ada indikasi bahwa negara demokrasi tersebut sedang turun pamornya karena rendahnya tingkat kepercayaan itu” (Saiful Mujani, 2007)

Sedangkan Norris, percaya bahwa ketidakpercayaan terhadap institusi politik terkait dengan generasi muda yang penuh kritis. Apabila jumlah generasi muda yang kritis meningkat, maka ketika semakin melebar pula jurang perbedaan antara demokrasi yang dicita-citakan dan kinerja aktual institusi politik. Norris memperingatkan bahwa ketidakpercayaan dapat mengakibatkan instabilitas demokrasi, khususnya di negara-negara demokrasi baru. Di negara-negara demokrasi yang sudah stabil, ketidakpercayaan publik mendorong reformasi institusional agar harapan publik dapat dipenuhi (Saiful Mujani 2007). Artinya peranan generasi muda sangat signifikan mempengaruhi terjadi perubahan tatanan pemerintah, seperti terjadinya revolusi, reformasi hingga terjadi referendum.

Dan menurut Saiful Mujani, Penulis buku “Muslim Demokrat (2007)”, ketidakpercayaan terhadap institusi politik cenderung menyebabkan instabilitas jika generasi muda yang tidak percaya pada institusi politik melakukan demonstrasi dengan cara-cara yang non-konvensional, dan tidak menyalurkan pandangan mereka melalui konsensus atau referendum dan aktivitas kelompok kepentingan yang normal. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap partisipasi politik juga secara potensial mendestabilisasi demokrasi jika hal itu dikombinasikan dengan keterlibatan politik dan diarahkan pada aktivitas protes. Jika tidak, ketidakpercayaan tidak bermakna apapun.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi dapat meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran warga negara. Memperkuat demokrasi dengan melibatkan lebih banyak suara dalam mengambil keputusan. Mendorong perubahan sosial dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun politisasi yang berlebihan dapat memicu polarisasi dan konflik sosial. Sehingga penyebaran informasi secara mobilisasi, yang menyesatkan atau propoganda dapat memanipulasi opini publik. Mobilisasi yang berbasis paksaan atau intimidasi dapat merusak demokrasi.

Aspirasi ini menunjukkan peningkatan kesadaran bahwa pemilu saja tidak cukup untuk menghadirkan demokrasi berkualitas. Bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dan kesadaran kritis generasi muda agar tidak jatuh pada formalisme belaka (Miriam Budiardjo 2008) Generasi muda Indonesia cenderung sensitif terhadap isu kesetaraan gender, hak minoritas, akses pendidikan, dan pemerataan ekonomi. Menurut Wasisto (2018, Opini Kompas.id), orientasi politik generasi muda semakin condong pada isu-isu substantif ketimbang ideologi partai.¹⁵ Meskipun potensinya besar, generasi muda tetap menghadapi beberapa hambatan, seperti apatisisme politik, ketidakpercayaan pada institusi, dan dominasi elite dalam politik elektoral. Selain itu, disinformasi digital juga menjadi tantangan besar yang memengaruhi kualitas partisipasi politik.

Adapun Wijayanto, memperingatkan bahwa ruang digital dapat memperkuat polarisasi, sehingga generasi muda perlu dibekali literasi politik dan media yang memadai. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik generasi muda membutuhkan dukungan sistemik melalui pendidikan politik, regulasi digital yang sehat, dan ruang publik yang inklusif

(Wasisto Raharjo Jati 2018). Generasi muda memainkan peran yang semakin penting dalam demokrasi modern. Dinamika politik yang terus berubah menuntut mereka untuk menyesuaikan bentuk-bentuk partisipasi politik dengan perkembangan teknologi, isu-isu sosial baru, dan perubahan struktur kekuasaan.

Aspirasi politik generasi muda menjadi penanda bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana negara dan masyarakat memberikan ruang yang lebih luas bagi mereka untuk terlibat secara bermakna dalam proses politik. Dan kepercayaan ini, dapat membentuk lobi politik dan relasi politik antar individu dalam terbentuknya institusional. Fenomena keberadaan jaringan sosial yang menjadi kekuatan politik, ini menegaskan argumen bahwa polarisasi hubungan sosial: pertemanan, keluarga besar, komunitas dan alumni memiliki legitimasi dari masyarakat (Sansan Hasanudin, 2014)

Aliansi hubungan sosial ini membawa ke ranah politik elektoral memiliki mekanisme keterlibatan berupa afiliasi terhadap partai politik dan harus memiliki sumber daya (modal massa) yang dapat mentransformasi menjadi modal politik didalam kontestasi politik elektoral. Sebuah jaringan sosial mampu berpotensi menjadi modal politik ketika seseorang anggota jaringan sosial masuk pada ranah politik praktis. Ini menunjukkan bahwa, ketika media melaporkan kandidat tertentu unggul dan elektabilitas bagus dalam survei, pemilih yang ragu-ragu bisa terdorong untuk memilih kandidat yang sedang populer. Endorsement dari figure dapat memperkuat efek *bandwagon*, seperti selebritas yang mendukung kandidat tertentu, ketua komunitas suku mendukung politikus tertentu karena persamaan suku, lebih memperkuat dampak tersebut (Sugeng Winarno 2023)

Interaksi antara mobilisasi massa, jaringan sosial dan efek *bandwagon*, ketiga elemen ini yang penulis analisis hingga membentuk dorongan perilaku partisipasi politik. Membentuk jaringan politik memfasilitasi mobilisasi dengan menyebarkan informasi dan membangun solidaritas. Mobilisasi politik dapat menciptakan efek *bandwagon*, jika semakin banyak orang terlihat mendukung suatu kandidat atau gerakan. Efek *bandwagon* dapat mempercepat mobilisasi dengan memberi kesan bahwa ada momentum besar di balik suatu gerakan atau kandidat.

Dalam studi penelitian yang dilakukan baru-baru ini (PEMILU2024), menunjukkan bahwa generasi muda mendominasi dalam penggunaan media digital, memainkan peran penting dalam demokrasi masa kini: media sosial menjadi sarana informasi politik dan ruang ekspresi identitas serta opini politik mereka. Namun penelitian itu juga menunjukkan bahwa meskipun potensi besar, tingkat partisipasi mereka dalam politik formal sering kali dinilai rendah (Ade Putra, 2025). Selain itu, Generasi Muda dan Krisis Kewarganegaraan Politik menemukan indikasi, krisis kewarganegaraan” di kalangan generasi muda — berupa apatisme, rendahnya kesadaran politik, dan minimnya keterlibatan dalam proses demokrasi formal.

Demokrasi tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan (pemerintah, partai, lembaga formal), tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan partisipasi warga, terutama warga muda yang kelak akan menjadi generasi penerus. Jika generasi muda memahami politik melalui pendidikan politik dan memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasi (termasuk via media sosial), maka mereka dapat aktif mengambil bagian dalam proses demokrasi, baik dalam bentuk partisipasi formal maupun non-formal. Tanpa keterlibatan mereka, demokrasi berisiko stagnasi, apatisme, atau representasi yang timpang.

Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi, di mana populasi usia produktif (termasuk generasi muda) sangat besar, ini bisa menjadi kekuatan demografis bagi demokrasi jika dimobilisasi secara sadar dan kritis (Khoirul Huda 2024) Dalam konteks Indonesia, demokrasi yang terus berubah, dikarena dipengaruhi oleh globalisasi, era digital, pluralitas sosial, serta tantangan struktural (korupsi, ketimpangan, polarisasi). Generasi muda tidak sekadar penonton atau pemilih pasif, mereka juga bisa menjadi motor perubahan. Namun, agar potensi ini benar-benar muncul, perlu upaya terstruktur, seperti:

1. Pendidikan politik di sekolah, kampus, komunitas dan masyarakat harus diperkuat agar kaum muda memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, mekanisme demokrasi, dan cara partisipasi politik yang sehat dan efektif.
2. Literasi media dan digital harus ditingkatkan supaya generasi muda tidak mudah percaya disinformasi, propaganda, atau manipulasi melalui media sosial.
3. Menciptakan ruang partisipasi: tidak hanya melalui pemilu atau partai politik, tetapi lewat aktivisme sosial, organisasi pemuda, komunitas lokal, dan kampanye kebijakan berbasis isu sehingga suara mereka nyata dan relevan.

4. Membangun politik representatif & inklusif: partai dan institusi politik harus terbuka menampung aspirasi dan ide-ide muda, termasuk soal isu-isu khas generasi muda (lingkungan, keadilan sosial, hak digital, pendidikan, lapangan kerja, dll.).

Dengan demikian, generasi muda bisa menghantarkan demokrasi ke arah yang lebih dinamis, adaptif, dan relevan, sesuai tantangan zaman sekaligus menjaga demokrasi tetap hidup, sehat, dan berbasis partisipasi aktif.

D. Kesimpulan

Partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh mobilisasi massa, jaringan sosial dan efek bandwagon. Mobilisasi membantu menggerakkan individu untuk berpartisipasi, jaringan sosial memperkuat interaksi dan penyebaran informasi, sementara efek bandwagon dapat mendorong lebih banyak orang untuk ikut serta dalam kegiatan politik karena mengikuti tren mayoritas. Generasi muda Indonesia memiliki peran kritis dan strategis dalam menjaga, memajukan, dan mentransformasi demokrasi — asalkan ada pendidikan politik yang memadai, inklusif, dan memanfaatkan ruang digital.

Di sisi lain, sejumlah literatur menggarisbawahi pentingnya pendidikan politik untuk membangun kesadaran dan partisipasi politik kaum muda. Pendidikan politik bagi Generasi Muda menunjukkan bahwa pendidikan politik membantu generasi muda memahami struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, sehingga mendorong partisipasi mereka dalam demokrasi. Misalnya, ketika Pemilihan Presiden 2024, didapati bahwa generasi muda memiliki potensi peran partisipatif yang cukup tinggi, terutama sebagai upaya nyata untuk mengubah peran negara menjadi lebih baik.

Dan sebaliknya, rendahnya kepedulian politik di kalangan muda merupakan tantangan besar bagi keberlanjutan demokrasi dan bahwa pendidikan politik (formal/informal) merupakan kunci untuk membangkitkan kesadaran politik. Nyatanya, media sosial dan dunia digital membuat batas antara politik formal dan informal semakin kabur — generasi muda bisa mempengaruhi opini publik, mobilisasi sosial, advokasi, dan bahkan kampanye politik lewat jalur digital — selama mereka literat dan kritis informasi. Studi generik global menunjukkan bahwa aktivitas media sosial yang intens bisa meningkatkan partisipasi politik—meskipun efeknya bervariasi — tetapi relevan sebagai ruang mobilisasi kaum muda. Tentu saja, potensi generasi muda sebagai pilar demokrasi tidak otomatis menjamin keberhasilan: efektivitasnya bergantung pada keberadaan pendidikan politik yang baik, literasi media dan digital yang memadai, saluran partisipasi politik yang terbuka, serta kemauan kolektif di kalangan generasi muda untuk terlibat aktif (bukan apatis atau sinis).

Beberapa pihak berargumen bahwa generasi muda cenderung apatis atau anti-politik karena pengalaman kekecewaan, korupsi, atau penyelewengan dalam politik, sehingga mereka memilih menjauh. Studi penelitian sebagaimana penulis uraikan diatas bahwa memang menunjukkan kenyataan rendahnya minat politik kaum muda. Namun, argumen ini tidak menutup kemungkinan bahwa dengan pendekatan yang tepat; pendidikan politik, literasi informasi, dan ruang partisipasi (termasuk jalur non-formal/digital) generasi muda bisa *diaktivasi menjadi agen perubahan*.

Kerangka yang ditampilkan dalam tulisan ini, menunjukkan bahwa klaim tentang peran penting generasi muda dalam demokrasi Indonesia bukan sekadar idealisme: ada bukti empiris dan konseptual yang mendukung terutama terkait dengan pendidikan politik dan keterlibatan dalam medium digital. Namun potensi itu tidak otomatis. Untuk mewujudkannya butuh usaha bersama: dari individu muda, institusi pendidikan, partai/organisasi, dan masyarakat luas. Jika dilakukan, generasi muda bisa menjadi penjamin masa depan demokrasi Indonesia bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek aktif perubahan.

E. Referensi

- Almond, G. A., & Verba, S. (2015). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Elwan, M., & Ode, L. (2019). Model dan Dampak Mobilisasi Politik Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Bontomatinggi Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Tahun 2016). *Journal Publicuho*, 1(4), 1-17.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Hasanudin, S. (2017). Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida Dalam Politik Elektoral Tasikmalaya. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 22(1), 4.
- Heryanto, A. (2015). *Identitas dan kenikmatan*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Huda, K., Doloksaribu, T. I., & Siregar, S. H. (2024). Perilaku Politik Mahasiswa dan Generasi Muda. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 761-782.
- Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, A., Asrul, A., Rajab, M., & Nur, L. O. M. A. (2025). Dinamika partisipasi politik generasi muda dalam Pemilu di era media sosial. *Portal Riset dan Inovasi Sistem Perangkat Lunak*, 3(3), 125-130.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik: Konsep-Konsep Dasar*. Jakarta: Grasindo.
- Wijayanto. (2014). *Demokrasi dan Media Digital di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Winarno, S. (2023). *Kontestasi Politik: Bandwagon Effect dalam Politik*.